

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Myanmar, sebuah bangsa yang kaya akan warisan budaya dan tradisi, telah menjadi saksi perjalanan politik yang kompleks dan penuh tantangan dalam upaya menuju demokrasi. Selama beberapa dekade, pemerintahan militer yang otoriter dan represif memegang kendali penuh atas panggung politik, merugikan hak-hak politik dan sipil warga Myanmar. Pada tahun 2010, sejalan dengan serangkaian reformasi politik, negara ini menyelenggarakan pemilihan umum pertama dalam waktu yang lama, menandai awal dari perubahan politik yang substansial.

Pada awalnya, sejarah politik Myanmar ditandai oleh dominasi pemerintahan militer yang keras dan otoriter. Masa ini mencapai puncaknya pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win merebut kekuasaan dalam kudeta militer. Selama puluhan tahun, rezim militer ini menerapkan kebijakan represif yang merugikan hak-hak politik dan sipil warga Myanmar. Hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara dan berkumpul dibatasi, serta partisipasi dalam proses politik sangat dibatasi.

Pada tahun 2010, terjadi perubahan signifikan ketika Myanmar mengadakan pemilihan umum pertama setelah beberapa reformasi politik. Meskipun sistem politik tetap diawasi ketat oleh militer, pemilu ini dianggap sebagai langkah awal menuju perubahan yang lebih besar. Meskipun masih ada keraguan dan skeptisisme terkait dengan keberlanjutan demokratisasi, pemilu ini memberikan harapan baru bagi rakyat Myanmar. Analisis mendalam dari ahli politik seperti Aung San Suu Kyi (2012) menyoroti kepentingan strategis pemilu ini, menganggapnya sebagai langkah awal penting menuju demokrasi yang lebih inklusif.

Pentingnya pemilu tersebut terletak pada potensinya untuk membuka jalan bagi partisipasi politik yang lebih luas dan memberikan suara kepada masyarakat Myanmar yang sebelumnya dibatasi oleh kebijakan otoriter rezim militer.

Meskipun pemilu tersebut mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan demokrasi yang ideal, itu tetap menjadi tonggak awal dalam perjalanan panjang menuju reformasi politik di Myanmar. Harapan akan perubahan lebih lanjut, lebih banyak kebebasan politik, dan pengakuan hak asasi manusia muncul sebagai cahaya di tengah-tengah sejarah politik yang kelam di masa lalu.

Transisi menuju demokrasi di Myanmar, terutama setelah pemilu 2015, menciptakan momen bersejarah yang mengubah landasannya. Pemilu tersebut menjadi poin balik yang signifikan ketika Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin oleh ikon demokrasi Aung San Suu Kyi, meraih kemenangan mengesankan dan memenangkan mayoritas kursi parlemen. Kemenangan ini menggulingkan dominasi militer yang telah lama memegang kendali politik di Myanmar.

Meskipun transisi ini tidak datang tanpa tantangan, terutama dari dinamika ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di negara tersebut, namun, perubahan politik ini membawa harapan baru bagi rakyat Myanmar. Kemenangan NLD di pemilu membawa suara mayoritas yang kuat yang menggantikan dominasi militer yang telah lama ada. Ini memberikan indikasi bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia bisa dihormati di masa mendatang.

Analisis mendalam oleh Tun (2016) menyoroti bahwa transisi menuju demokrasi memerlukan usaha keras dan komitmen penuh dari semua pihak yang terlibat, termasuk militer. Harapan tumbuh bahwa era baru telah dimulai di Myanmar, di mana nilai-nilai demokrasi akan menjadi landasan utama pemerintahan. Proses ini bukan hanya tentang pergantian kekuasaan, tetapi juga tentang mengganti paradigma politik yang telah ada selama puluhan tahun.

Pentingnya transisi ini tidak hanya terletak pada pemindahan kekuasaan dari militer ke pemerintahan yang dipilih secara demokratis, tetapi juga pada penciptaan fondasi untuk masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Harapan ini tercermin dalam dukungan besar-besaran dari rakyat Myanmar terhadap perubahan ini, serta dalam perhatian internasional yang melihat Myanmar sebagai model demokrasi potensial di kawasan tersebut.

Namun, sementara pemilu 2015 membawa optimisme dan harapan, transisi ini juga menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam menanggapi ketegangan etnis yang telah lama ada. Tetapi, melalui keterlibatan dan komitmen dari semua pihak terlibat, transisi ini memberikan tanda bahwa perubahan positif menuju demokrasi yang lebih kokoh dan inklusif mungkin tercapai di Myanmar.

Pada tanggal 1 Februari 2021, harapan untuk demokrasi yang berkembang di Myanmar hancur ketika militer melancarkan kudeta, menangkap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh penting lainnya. Kudeta ini, menurut analisis oleh Win (2021), menjadi titik balik yang menyakitkan dalam perjalanan demokrasi Myanmar yang sedang berlangsung. Militer kembali mengambil kendali penuh atas pemerintahan, menggulingkan proses demokratisasi yang sedang berkembang dan menghapuskan kebebasan sipil yang baru-baru ini diperoleh oleh rakyat Myanmar.

Tindakan militer ini memicu protes besar-besaran di seluruh negeri. Rakyat Myanmar, yang sebelumnya merasakan sentuhan demokrasi, sekarang mendapati diri mereka terperangkap dalam ketidakpastian dan kembali ke rezim militer yang otoriter. Protes ini menjadi saluran ekspresi bagi ketidakpuasan dan perlawanan terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

Protes-protes tersebut mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan rakyat Myanmar terhadap kembalinya kekuasaan militer. Mereka menuntut restorasi demokrasi dan kebebasan sipil yang telah dicapai sebelumnya. Demonstrasi-demonstrasi damai dan unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Myanmar menjadi sorotan internasional, menarik perhatian organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional.

Organisasi hak asasi manusia, seperti Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International, dengan tegas mengutuk tindakan represif militer dan menyerukan pembebasan segera bagi Aung San Suu Kyi dan para tahanan politik lainnya. Kritik internasional terhadap militer Myanmar semakin memperkuat tekanan pada pemerintahan yang tidak sah.

Kondisi pasca-kudeta ini menegaskan bahwa perjuangan rakyat Myanmar untuk demokrasi masih jauh dari selesai. Meskipun mereka menghadapi tantangan besar dalam menghadapi reaksi keras militer, ketekunan dan tekad rakyat Myanmar dalam memperjuangkan hak-hak demokratis mereka mencerminkan semangat perlawanan yang teguh.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penulis memiliki rumusan “mengapa proses transisi menuju demokrasi di Myanmar mengalami kegagalan?”

1.3. Landasan Teoritik

1.3.1. Teori Modernisasi dan Demokratisasi

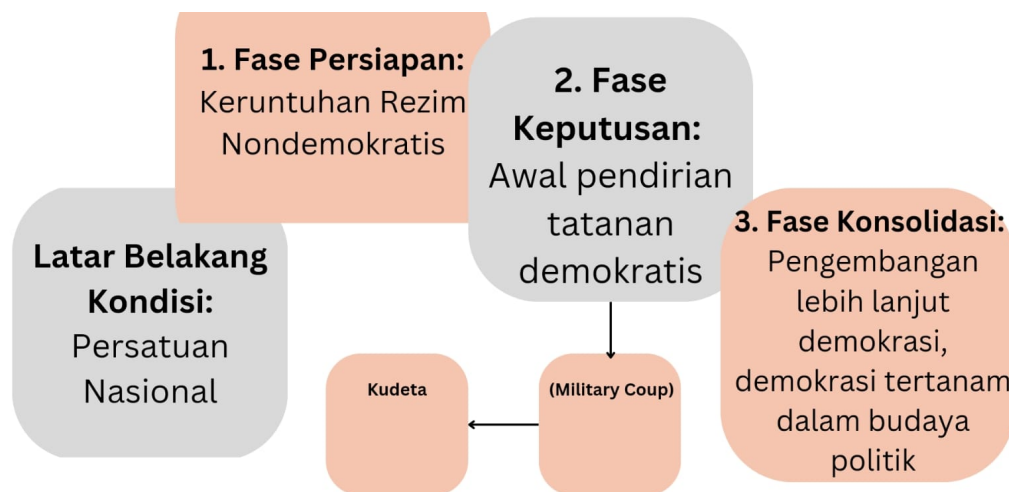
Dalam konteks upaya mempercepat proses demokratisasi suatu negara, teori modernisasi dan demokratisasi menjadi dasar konseptual yang signifikan. Seymour M. Lipset, sebagai salah satu tokoh utama dalam teori ini dan dianalisis oleh Sorensen (1993), menyoroti peran utama faktor ekonomi sebagai prasyarat esensial untuk perkembangan demokrasi yang berkelanjutan.

Teori modernisasi melihat bahwa negara yang berhasil mencapai tingkat kemampuan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk membentuk dan menjaga sistem demokrasi yang stabil. Lipset, ahli politik terkemuka, memperkuat pandangan ini dengan keyakinannya bahwa semakin kaya suatu bangsa, semakin besar kemungkinan munculnya demokrasi (Sorensen, 1993). Pemikiran ini menegaskan hubungan intrinsik antara kemajuan ekonomi dan demokratisasi, menekankan bahwa perkembangan ekonomi menjadi fondasi esensial bagi kelangsungan demokrasi.

Dalam kerangka ini, masyarakat industri modern dianggap sebagai pendorong utama dalam membentuk negara yang demokratis. Pandangan ini menyoroti peran integral perkembangan industri dalam mendorong proses demokratisasi. Peningkatan tingkat pendidikan dan kesadaran politik di kalangan masyarakat industri modern dianggap sebagai fondasi yang kuat bagi perkembangan nilai-nilai demokratis. Dengan demikian, terwujudnya struktur ekonomi yang dinamis diiringi dengan pendidikan dan kesadaran politik yang tinggi dapat menciptakan kondisi yang mendukung berkembangnya sistem demokrasi yang efektif.

Meskipun faktor ekonomi diakui sebagai elemen kunci dalam dinamika demokratisasi, beberapa kritikus mungkin menyoroti kompleksitas proses tersebut. Budaya politik yang berkembang, sejarah politik yang kompleks, dan tingkat pendidikan masyarakat juga dapat memainkan peran sentral dalam membentuk keberhasilan atau kegagalan upaya demokratisasi (Sorensen, 1993). Sebagai contoh, budaya politik yang kurang mendukung demokrasi atau sejarah politik yang sarat konflik dapat menjadi hambatan serius dalam mewujudkan sistem demokratis yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, perspektif ini menegaskan bahwa walaupun faktor ekonomi menjadi unsur utama yang mempercepat proses demokratisasi, pemahaman yang holistik harus mempertimbangkan interaksi antara berbagai faktor. Hanya melalui pendekatan yang memadukan faktor-faktor tersebut, dapatlah dipahami dan dikembangkan proses demokratisasi yang tidak hanya berjalan efektif tetapi juga berkelanjutan.



Bagan 1.1 Model : Transisi Menuju Demokrasi

1.3.2. Teori Hegemoni

Teori sentimen kekuasaan sepihak, yang juga dikenal sebagai teori hegemoni, merupakan konsep yang diajukan oleh Antonio Gramsci, seorang filsuf politik Italia pada abad ke-20. Teori ini mencakup ide bahwa dominasi politik sebuah kelompok atau kelas tidak hanya dicapai melalui penggunaan kekuatan fisik

atau kekerasan semata, tetapi juga melalui pengendalian ideologi dan budaya masyarakat. Dalam konteks Myanmar, teori ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran demokrasi politik, khususnya terkait dengan peran represif militer.

Antonio Gramsci menyatakan bahwa kekuatan kelompok dominan dalam masyarakat tidak hanya terletak pada kekuatan materi atau fisik, tetapi juga dalam kemampuan mereka untuk mengendalikan dan membentuk cara pandang, nilai, dan keyakinan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah hegemoni, yaitu dominasi kelompok atau kelas tertentu atas kelompok lain melalui legitimasi dan persetujuan sukarela.

Dalam konteks Myanmar, militer telah memainkan peran penting dalam menjaga hegemoni mereka melalui pengendalian politik dan kekerasan. Sebagai contoh, dalam sejarah politik Myanmar, militer telah memegang kendali penuh atas negara tersebut selama puluhan tahun, mulai dari tahun 1962 hingga awal 2010-an. Selama periode ini, militer tidak hanya menggunakan kekuatan fisik untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga mengontrol ideologi dan narasi yang ada dalam masyarakat Myanmar.

Dalam studi oleh Myat The Thitsar, dkk. (2019), mereka menyoroti bagaimana militer Myanmar telah menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk pembungkaman oposisi politik, sensor media, dan pengendalian pendidikan. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menekan oposisi, tetapi juga untuk memastikan bahwa ideologi militer dipromosikan dan diterima oleh masyarakat secara luas.

Lebih lanjut, dalam penelitian oleh Aung Zaw (2005), dia membahas bagaimana militer Myanmar telah secara sistematis menekan hak-hak sipil dan politik, termasuk penganiayaan terhadap pengunjuk rasa, penangkapan aktivis politik, dan penyensoran media. Hal ini mencerminkan upaya militer untuk mempertahankan hegemoni mereka dengan cara yang seringkali represif.

Kaitannya dengan teori sentimen kekuasaan sepihak oleh Gramsci, penekanan oleh militer Myanmar terhadap ideologi dan budaya masyarakat dapat dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan hegemoni mereka. Penggunaan kekerasan dan represi oleh militer tidak hanya untuk mempertahankan kekuasaan

mereka secara langsung, tetapi juga untuk memastikan bahwa ideologi dan nilai-nilai yang mendukung kekuasaan mereka tetap dominan di masyarakat.

Secara keseluruhan, teori sentimen kekuasaan sepihak oleh Gramsci memberikan pemahaman yang berguna tentang bagaimana hegemoni politik dan kebudayaan dapat dipertahankan oleh kelompok dominan, seperti militer di Myanmar. Faktor represif yang digunakan oleh militer merupakan salah satu strategi untuk menjaga kontrol mereka atas masyarakat dan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran demokrasi politik di negara tersebut.

1.4. Argumen

Peran Institusi masyarakat dalam penyelesaian konflik kudeta Myanmar, khususnya dalam kasus kemunduran rezim Aung San Suu Kyi. Dalam konteks ini Transisi menuju demokrasi gagal karena :

a. Lemahnya Civil Society:

Lemahnya peran dan keberlanjutan masyarakat sipil dalam mendukung proses demokratisasi di Myanmar berkontribusi terhadap kegagalan transisi.

b. Kuatnya Lembaga Militer:

Kekuatan dan pengaruh yang berlebihan dari lembaga militer dalam politik Myanmar menjadi hambatan utama dalam mencapai transisi demokratis yang berkelanjutan.

c. Gagalnya Peran Internasional:

Kegagalan atau kurangnya tekanan dari komunitas internasional dalam mendukung proses demokratisasi di Myanmar dapat menjadi faktor krusial dalam kegagalan transisi.

1.5. Tinjauan Pustaka

1. Kartini (2015), Penelitian berjudul "Kegagalan Empat Negara Arab dan Keberhasilan Indonesia dalam masa Transisi Demokrasi," Konsep demokrasi di negara-negara Arab mulai diperkenalkan kembali ke dalam sistem pemerintahan setelah terjadi serangkaian pemberontakan populer sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan politik. Peristiwa Arab Spring yang melanda Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2011 menjadi titik balik bagi proses demokratisasi. Runtuhnya rezim otoriter di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman akibat gerakan

pemberontakan rakyat mengantarkan negara-negara tersebut ke tahap transisi dari pemerintahan otoriter ke bentuk pemerintahan lainnya. Variabel yang digunakan dalam analisis meliputi "masa-masa ketertiban yang baik", "perdamaian sosial", dan "penghormatan terhadap otoritas". Fenomena yang terjadi di empat negara Arab dan Indonesia dianalisis dalam tulisan ini untuk mengetahui arah transisi politik suatu negara, apakah menuju proses demokratisasi atau justru berakhir pada perang saudara.

2. Novitri et, al.(2023), "Failure of Myanmar's Democratic Transition," Myanmar adalah salah satu negara yang melakukan kudeta militer beberapa kali dari tahun 1962 hingga 2021. Meskipun dikenal sebagai penguasa otoriter, junta militer telah melakukan kebijakan yang lebih demokratis, seperti membuka ruang untuk kebebasan pers dan mengadakan pemilihan Myanmar yang memungkinkan partisipasi partai pro-demokrasi, yaitu Partai NLD. Namun, junta militer tiba-tiba melakukan kudeta militer pada tahun 2021. Pada tahun-tahun sebelumnya, junta militer Myanmar mencoba untuk melakukan transisi demokrasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor apa yang menyebabkan transisi demokrasi di Myanmar gagal, meskipun ada hasil positif sebelumnya. Fenomena transisi demokrasi di Myanmar akan dianalisis menggunakan teori transisi demokrasi, teori demokratisasi, dan konsep hubungan sipil-militer. Studi ini menggunakan pendekatan penjelasan untuk menentukan faktor-faktor penyebab kegagalan transisi demokrasi di Myanmar. Berdasarkan teori, konsep, dan metode penelitian yang digunakan, kegagalan transisi demokrasi di Myanmar terjadi karena empat faktor: Faktor pertama adalah transisi demokrasi di Myanmar menggunakan pendekatan dari atas ke bawah. Faktor kedua adalah transisi tidak diikuti dengan penerapan demokrasi yang sesungguhnya. Faktor ketiga adalah hubungan sipil-militer di Myanmar termasuk dalam kategori akomodasi sipil yang tidak seimbang. Faktor keempat, militer khawatir Aung San Suu Kyi berhasil mengubah konstitusi 2008 yang akan menghilangkan hak istimewa militer.
3. SD & Putri (2021), Penelitian berjudul "Dampak Kegagalan Rezim Khadafi terhadap Meningkatnya Eskalasi Konflik dan Intervensi Global", Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kegagalan rezim Gaddafi terhadap eskalasi konflik dan intervensi global. Kegagalan yang dialami oleh rezim

Gaddafi menyebabkan perang saudara dalam perebutan wilayah Libya yang didukung oleh tindakan pemberontakan dari berbagai kelompok aliansi masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, tulisan ini menggunakan teori prinsip-prinsipal, penjaga perdamaian, dan teori domino sebagai kerangka konseptual untuk menggambarkan fenomena ini. Sumber data dalam tulisan ini diperoleh dari studi literatur, termasuk jurnal, laporan penelitian, dan berita online yang terpercaya untuk mendukung analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelanjutan eskalasi konflik di Libya terjadi setelah bangkitnya Revolusi Melati dan Arab Spring di Libya, yang mengakibatkan jatuhnya rezim Gaddafi dan memicu perang antara Libya Barat dan Libya Timur, seiring dengan munculnya NTC (Dewan Transisi Nasional), GNC (Kongres Nasional Umum), dan intervensi global dari Amerika Serikat/NATO, serta peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengurangi konflik hingga saat ini. Eskalasi konflik yang terjadi tidak hanya meliputi perebutan wilayah, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan rakyat Libya yang memicu kekacauan, pemberontakan, perasaan ketidakadilan, ketakutan, dan dapat menyebabkan negara Libya runtuh.

4. Saiful & SI (2020), “Tranformasi Politik di Timur Tengah Pasca Musim Semi Arab: Demokratisasi yang Gagal?”, Artikel ini menggambarkan transformasi politik di Timur Tengah setelah satu dekade pemberontakan Arab yang mengguncang dunia, yang dikenal sebagai fenomena Arab Spring. Pemberontakan yang dipimpin oleh kaum muda dimulai di Tunisia pada Januari 2011, mengikuti aksi bakar diri Muhammad Bouazizi, yang dilarang berdagang lima kali dan dihina oleh petugas polisi wanita, yang kemudian membangkitkan kemarahan rakyat Tunisia dan dengan cepat menyebar ke seluruh negara Arab dengan skala dan konsekuensi yang berbeda. Empat rezim otoriter telah runtuh, yaitu di Tunisia, Libya, dan Mesir, sementara Suriah terperangkap dalam perang saudara yang berlangsung hingga kini. Delapan rezim monarki Arab relatif tidak terpengaruh, kecuali Bahrain yang mendapat bantuan dari intervensi militer Arab Saudi untuk melawan para pemberontak. Arab Spring berdampak pada terjadinya transformasi politik di negara-negara Arab dalam tiga kategori, yaitu perubahan rezim, negara dalam ketidakstabilan, dan transformasi dalam rezim. Demokratisasi belum sepenuhnya terjadi, kecuali di Tunisia.

5. Samir & Basyar (2022), Penelitian berjudul “Kegagalan Demokratisasi Di Mesir Pasca-Arab Spring”, Arab Spring memberikan efek domino terhadap stabilitas politik Mesir. Transisi politik yang terjadi setelah Husni Mubarak mengundurkan diri dari jabatannya tidak menunjukkan peningkatan iklim demokrasi di Mesir. Terpilihnya Mursi dari kalangan sipil sebagai presiden secara demokratis tidak membuat proses demokrasi di Mesir berjalan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan demokrasi setelah Arab Spring dan meninjau dominasi militer dalam politik Mesir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan demokrasi di Mesir disebabkan oleh perpecahan di antara elite politik Mesir yang menimbulkan sentimen polarisasi, krisis ekonomi di Mesir, dan dominasi militer dalam politik Mesir yang memudahkan militer untuk melakukan kudeta. Dalam konteks ini, peran militer dalam politik nasional tidak dapat dipisahkan karena telah terbentuk tatanan istimewa yang memperkuat dominasi militer di Mesir.

1.6. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan metode (*library-research*), yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai data sekunder yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penggunaan Teknik pengumpulan data didapat dengan memperoleh bahan penelitian dari buku, jurnal, artikel, dan surat kabar yang dapat diperoleh dari internet.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dapat dilakukan dengan adanya penyelidikan, pengumpulan serta analisis data. Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif adalah suatu penelusuran atau pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Penelitian kualitatif memandang fenomena sosial secara holistik, dimana akan semakin interaktif serta akan lebih kompleks. Metode ini tidak hanya mengandalkan statistik atau sebuah ukuran saja, namun juga dengan menafsirkan makna data (Creswell & John, 2013). Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena ungkapan kata-kata digunakan untuk menggambarkan

keadaan atau gejala yang diteliti dengan diarahkan untuk menjelaskan data-data, fakta-fakta, kejadian- kejadian secara lebih akurat.

Penelitian yang dilakukan juga menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data menggunakan buku, jurnal, dokumen, surat kabar, dan juga media internet.

1.7. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi persoalan agar tidak menyimpang terlalu jauh, dan untuk memudahkan pembuktian terhadap argumen dan pokok permasalahan yang telah ditentukan, maka batasan pada penelitian ini yaitu fokus pada perkembangan demokratisasi Myanmar oleh individu Aung San Suu Kyi selaku Perdana Menteri Myanmar. Adapun penelitian ini menggunakan jangka waktu yang dimulai dari reformasi politik pada pemilihan umum Myanmar di tahun 2010 hingga kegagalan Myanmar dalam demokratisasi pada tahun 2021.

1.8. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi kegagalan Aung San Suu Kyi mempertahankan kebijakan Demokrasi.
2. Memberikan gambaran mengenai perkembangan Demokratisasi pada periode Aung San Suu Kyi dalam menangani reformasi politik beserta dinamikanya.
3. Memberikan gambaran tentang sikap tidak konsisten civil society dalam menerima reformasi politik yang masuk di tengah ketidakstabilan dalam negeri Myanmar.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bab utama untuk menjelaskan topik skripsi dan terdapat sub bab yang diharapkan dapat lebih mampu menjelaskan secara rinci pada bab utama. Perincian masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Argumen, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan, dan Daftar Isi.

Bab II memaparkan tentang awal mula perkembangan individu Aung San Suu Kyi selama kiprahnya di dunia politik Myanmar, tantangan demokrasi pada periode Aung San Suu Kyi, hingga terjadinya kudeta oleh junta Militer.

Bab III membahas tentang poin-poin argument penulis terhadap kemunduran demokratisasi yang terjadi pada Myanmar pasca periode Aung San Suu Kyi.

Bab IV berisi penutup, dengan menyampaikan kesimpulan berupa intisari dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.